

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Aritonang, J. S. (2016). *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Brotodihardjo R. Sumitro. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Enklaar, D. I. (2014). *Sejarah Gereja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- GKPS, K. P. (2020). *Tata Gereja GKPS*. Pematangsiantar: Kalportase GKPS.
- GKPS, P. S. (2021). *Susukkara*. Pematangsiantar: Kalportase GKPS.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- HSB, A. M. (2016). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 251-264.
- Lestari, Paramita, M., & Afifah, N. (2020). Analisis Penerapan PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri di CV Tanjung Express. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 166-181.
- Liberti, P. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Naharto, M. J., & Elisa, T. (2014). Analisis Tujuan Pemungutan serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax & Accounting Review*.

P. Dasuha, J. R., & Sinaga, M. L. (2003). *Tole! Den Timorlanden Das Evangelium*.

Pematangsiantar: Kalportase GKPS.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis (Seri PPh Umum Nomor 15).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pelunasan Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Pontoh, C. R. (2013). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK 45 pada Gereja BZL. *Jurnal EMBA*.

- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Risandayu, C. P. (2019). Tinjauan Atas Pemenuhan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Gereja Bethel Indonesia Tabgha Bengkong Batam. *Karya Tulis Tugas Akhir*.
- Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2005). *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sandra. (2021, Juni). *Pemotongan dan Pemungutan Pajak, Apa Perbedaannya?* Diambil kembali dari Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/60c7032eeb01ba1922ccae2f/Pemotongan-dan-Pemungutan-Pajak-Apa-Perbedaannya?>
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas Tuntas PPh Potput: Penerapan Aturan Terbaru Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sidarta, A., & Tjondro, E. (2014). Analisa Pembayaran Pajak dan Persepsi Penghasilan Menurut Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar Persepuluhan. *Tax & Accounting Review*.
- Siregar, A. C. (2018). Tinjauan Aspek Perpajakan atas Penghasilan yang Diterima oleh Gereja dan Pendeta. *Karya Tulis Tugas Akhir*.
- Sulist. (2010, April 28). *Aspek Pajak untuk Gereja dan Yayasan yang dinaunginya*. Diambil kembali dari Blog tentang Penggalian Potensi (Galpot) Pajak: <https://sulistnugroho.blogspot.com/2010/04/aspek-pajak-untuk-gereja-dan-yayasan.html>

Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vo. 15, No. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Zain, M. (2010). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.